

Bulan

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Tahun

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|

Harian Umum

Online

Provinsi

Kabupaten/Kota

Pemprov Raih WTP 9 Kali Berturut-turut, Ketua BPK RI Minta Pemda se-KTI Belajar ke Gorontalo

11/6/2021 20:18 By ALEX



Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna didampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memberikan keterangan pers usai menyerahkan LHP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov Gorontalo, bertempat di gedung DPRD, Jumat (11/6/2021). (F. Salman)

Hulondalo.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Opini WTP yang diraih Pemprov Gorontalo ini merupakan WTP ke 9 kali secara berturut-turut di bawah pemerintahan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.

Opini WTP ini terasa spesial karena diserahkan langsung Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna saat Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Gorontalo Tahun Anggaran 2020, Jumat (11/6/2021).

Pada kesempatan itu, Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menyebut bahwa Provinsi Gorontalo menjadi daerah pertama yang dikunjunginya untuk menyerahkan opini WTP. Dia pun meminta kepada pemda-pemda di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk belajar ke Gorontalo dalam percontohan pelaporan keuangan.

“Kenapa kami datang ke Gorontalo? Karena pemerintah provinsi dan pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan keuangannya tepat pada waktunya. Ini yang kita harapkan agar semua pemerintah provinsi di kawasan Indonesia Timur melakukan hal yang sama. Ini sangat penting,” ujar Agung.

Dikatakan Agung pula, pelaporan keuangan tepat waktu khususnya bagi pemerintah di kawasan Indonesia Timur masih menyisakan pekerjaan rumah. Masih ada yang terlambat menyampaikan dari yang seharusnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun molor hingga bulan ke 7.

“Akuntabilitas itu ‘kan bertahap, pertama ‘kan mereka laporkan dulu. Ini masih ada yang terlambat, ada yang bulan 6, bulan 7. Ini berdampak pada kepatuhan, akuntabilitas, manfaat dan ada risiko,” kata Agung.

Terpisah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku sangat bahagia atas pencapaian WTP ini. Dia menilai pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran BPK RI dalam melakukan arahan, monitor, evaluasi, tindak lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan.

“Penyerahan LKPD tahun ini merupakan penyerahan yang sangat berarti bagi kami, karena laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh bapak ketua BPK RI. Terima kasih pak telah meluangkan waktunya. Saya yakin dan percaya tim BPK RI, akan selalu dekat dengan kami untuk memberikan pembinaan dan arahan dalam mengelola keuangan daerah,” ujar Rusli.

Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK, Gubernur Rusli Habibie pun berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

“Tahun ini WTP yang ke-9, sehingga 9 kali berturut turut kami WTP, walaupun masih di sana-sini banyak kritikan-kritikan bahkan mungkin tidak mempercayai hasil audit kita. Sehingga itu, terima kasih kami ucapkan pak, untuk tim BPK dan untuk rekan-rekan DPRD,” tandasnya. **(adv/alex**